

## Proses kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera dalam mempertahankan eksistensi partai politik menjelang Pemilu tahun 2014

Yusa Djuyandi <sup>1\*</sup>, Fifi Lutfiah Sodikin <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup> Political Insight, Bandung, Indonesia

\* Korespondensi: [yusa.djuyandi@unpad.ac.id](mailto:yusa.djuyandi@unpad.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### Info Publikasi:

Artikel Penelitian

#### Sitasi Cantuman:

Djuyandi, Y., & Sodikin, F. L. (2019). *Regeneration Process of The Prosperous Justice Party (PKS) to Maintain Its Existence by Election Year 2014*. *Society*, 7(1), 11-20.

DOI : [10.33019/society.v7i1.72](https://doi.org/10.33019/society.v7i1.72)

Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

### ABSTRAK

Partai Politik sebagai salah satu sarana yang penting dalam mempersiapkan pemimpin nasional, karena di dalamnya terdapat proses rekrutmen politik guna mendapatkan calon-calon pemimpin yang diharapkan masyarakat. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), salah satu partai politik yang berbasis Islami di Indonesia, memiliki Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di setiap kota / kabupaten. DPD PKS Kota Bandung memiliki proses kaderisasi yang menarik. Selain itu, DPD PKS Kota Bandung juga memiliki organisasi-organisasi yang disebut dengan *under brow* yang telah mencetak kader-kader unggulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kaderisasi PKS di Kota Bandung dalam mempertahankan eksistensi partai pada Pemilu 2014 menggunakan teori rekrutmen politik melalui jalur kaderisasi yang dikemukakan oleh Almond dan Powell. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui data sekunder yang dihasilkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung. Data primer diambil melalui proses wawancara kader PKS. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses kaderisasi yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Bandung, mulai dari pendidikan sampai dengan pelatihan, tidak hanya mempengaruhi kualitas dari setiap kader yang diusungnya, tetapi juga mempengaruhi kualitas dan eksistensi partai politik.

**Kata Kunci:** Dewan Pimpinan Daerah; Eksistensi; Kaderisasi; Partai Keadilan Sejahtera; Pemilu

## Pendahuluan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai politik yang berbasis agama Islam dan dianggap memiliki strategi yang baik dalam melakukan seleksi calon-calon kadernya. Sebagai partai politik, PKS mengutamakan atau mengedepankan pola kaderisasi yang baik untuk menghasilkan kader-kader yang berkualitas yang akan menjadi tokoh yang bertanggung jawab dalam kepemimpinan partai serta pemimpin nasional (Suroto dan Rudianto, 2003; Tunjungsari, Lestari, dan Sumarno, 2017).

Penelitian ini mengkaji tentang proses kaderisasi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Bandung. Proses kaderisasi dilakukan melalui berbagai macam cara, salah satunya dengan mengikutsertakan kader-kader partai untuk mengikuti sekolah kepemimpinan partai yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Provinsi Jawa Barat. Dari kegiatan tersebut diharapkan kader-kader partai mendapatkan pembekalan secara komprehensif, mulai dari pengetahuan tentang kepartaian hingga hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan sosial kemasyarakatan, bangsa dan negara. Sekolah kepemimpinan partai juga bertujuan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang berkualitas dan berakhlak, yang akan menempati jabatan struktural internal partai maupun jabatan pada kepemimpinan publik.<sup>1</sup>

Persaingan antar partai politik sangat ketat, terutama dengan hadirnya partai baru yang memiliki modalitas politik cukup besar karena adanya pola relasi atau akses kepada media. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi PKS untuk mempertahankan

eksistensi partai pada Pemilu 2014. Salah satu pola kaderisasi PKS yang dikembangkan melalui gerakan Jamaah Tarbiyah di kampus-kampus (Anismar, 2014) mulai menghadapi persaingan yang ketat. Partai lama maupun baru mulai masuk dan menguatkan pengaruhnya di perguruan tinggi dengan merekrut mahasiswa ke dalam gerakan sayap muda partai. Tidak hanya melakukan sosialisasi visi dan misi serta program kerja, partai-partai juga mengadakan kegiatan yang dapat merangkul kelompok pemilih mahasiswa seperti kegiatan pelatihan "Leadership" hingga kegiatan seminar wiraswasta.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sudah lebih dahulu mengembangkan jaringan di perguruan tinggi melalui Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Namun demikian, PDI Perjuangan sudah mulai menggunakan strategi baru dalam merangkul kelompok milenial melalui kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berbaur politis. Tidak hanya itu, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Nasional Demokrat juga sudah menerapkan strategi serupa dengan PDI Perjuangan. Oleh karena itu, untuk mempertahankan eksistensi partai, PKS mulai melirik aktivitas baru dalam pola kaderisasinya (Juliano, 2014).

Sebagai partai politik yang berbasis pada agama dan sejak awal ditasbihkan sebagai partai dakwah, aktivitas baru dalam pola kaderisasi yang dilakukan oleh PKS dianggap sebagai sebuah gerakan yang berani. PKS melakukan modifikasi gerakan politiknya serta menanggung konsekuensi yang sangat besar melalui reorganisasi dan perubahan pola strategi kaderisasi partainya. Reorganisasi PKS dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor penting yang datang dari kebutuhan masyarakat dan konteks demokrasi di Indonesia, dengan memperlunak garis

<sup>1</sup><http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/11/25/pks-jawa-barat-gelar-sekolah-kepemimpinan-partai-385846> (PKS Jawa Barat Gelar Sekolah Kepemimpinan Partai) 11 Juli 2018

ideologi dalam rangka kepentingan strategis jangka pendek untuk mendapatkan suara. Hal ini diperlukan untuk menunjukkan kepada publik bahwa PKS sangat memperhatikan isu-isu yang diminati atau dituntut oleh publik, mulai dari isu politik dan hukum, seperti isu anti korupsi dan konsisten dalam mengawal pemerintahan yang baik, sampai pada isu pengembangan ekonomi kerakyatan. Hal ini oleh Aminuddin (2010) dianggap mampu memberikan keuntungan besar bagi PKS, sebab jika hanya bergerak pada upaya memelihara basis ideologi lama, maka PKS hanya akan mendapatkan suara dari pemilih ideologis saja, sedangkan pemilih di luar basis ideologi akan diambil oleh partai lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera dalam mempertahankan eksistensi partai menjelang Pemilu tahun 2014 untuk daerah pemilihan Kota Bandung?

Ada beberapa studi atau kajian penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan atau relevansi dengan penelitian ini. Yang pertama adalah sebuah penelitian oleh Anneu Dahliany (2012) yang berjudul "Pola Rekrutmen Pemimpin Partai Politik Dalam Meningkatkan Kerja Partai Politik (Studi kasus di DPD PKS Kota Bandung)". Hasil Penelitian tersebut menjelaskan mekanisme yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Bandung dalam proses rekrutmen pemimpin partai dengan dilakukannya Pemira (Pemilu Raya) dengan pertimbangan dari *Majlis Syura* (majelis permusyawaratan atau badan legislatif).

Kedua adalah penelitian oleh Akbar Sandro Yudho Diharso (2011) yang berjudul "Sistem Pengkaderan di Kalangan Partai Islam (Studi Tentang Tarbiyah PKS di Yogyakarta)". Secara garis besar tesis membahas mengenai mekanisme Tarbiyah

yang ada di dalam PKS sebagai syarat dan rekrutmen calon kader.

Dan ketiga adalah penelitian oleh Aminuddin (2010) mengenai "Reorganisasi Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia". Penelitian ini lebih menjelaskan tentang metamorfosis PKS yang merupakan bagian dari strategi jangka menengah untuk mental basis konstituen yang perlahan tapi pasti sudah mulai terbentuk dan melingkupi wilayah kesadaran sosial politik yang lebih luas.

Maka dari itu, posisi penelitian ini bersifat memperluas dan memperkaya literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ketiga penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai eksistensi partai politik sebagai fokus analisis penelitian. Penelitian ini menjelaskan bagaimana proses kaderisasi yang dilakukan DPD PKS Kota Bandung sehingga menghasilkan kader-kader yang berkualitas serta dapat mempertahankan basis massa yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi PKS. Dipilihnya Kota Bandung sebagai lokasi penelitian dikarenakan merupakan basis PKS yang besar.

## **Kerangka Teori**

### **1. Fungsi Partai Politik**

Di negara yang menggunakan sistem politik demokrasi, keberadaan partai politik dianggap penting sebagai representasi dari perwakilan kelompok masyarakat. Kehadiran partai politik sangat penting dalam tatanan masyarakat yang modern dan berstruktur kompleks, karena partai politik dianggap memiliki kemampuan untuk menyalurkan partisipasi politik masyarakat yang kompleks (Djuyandi, 2018: 150).

Meskipun partai politik di negara demokrasi konstitusional (liberal) dengan di negara otoriter (komunis) menjalankan peran yang berbeda, tetapi partai memiliki kesamaan fungsi, yaitu diantaranya:

- a. Fungsi sosialisasi politik, yaitu mentransmisikan budaya politik dalam rangka pembentukan sikap dan orientasi anggota masyarakat sebagai warga negara (pendidikan politik).
- b. Fungsi rekrutmen politik, yaitu partai melakukan seleksi dan pemilihan serta pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya, dan pemerintah secara khusus.
- c. Fungsi untuk partisipasi politik, yaitu menjadi sarana kegiatan bagi masyarakat dalam mempengaruhi proses pembentukan pemimpin pemerintahan melalui Pemilu dan pembuatan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah.
- d. Fungsi komunikasi politik, yaitu sebagai penyampai informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.
- e. Fungsi partai politik sebagai sarana pengatur konflik, yaitu membantu untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisir terjadinya konflik. Kondisi ini juga didasari oleh pandangan Lijphart (1968) yang mengatakan bahwa adanya perbedaan atau perpecahan di tingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerjasama di antara elite-elite politik. (Djuyandi, 2018: 152-154).

Beberapa fungsi partai politik di atas memiliki kesamaan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Budiardjo (2009: 405-409) bahwa partai politik di negara demokrasi memiliki sejumlah fungsi, yaitu:

- a. Sebagai sarana komunikasi politik.
- b. Sarana sosialisasi politik.
- c. Sarana rekrutmen politik.
- d. Sarana pengatur konflik.

Perbedaan antara Djuyandi (2018) dengan Budiardjo (2009) terkait dengan fungsi partai politik adalah terletak pada fungsi partisipasi politik.

## **2. Kaderisasi Partai Politik**

Berdasarkan pada salah satu fungsi partai politik di atas, yaitu fungsi rekrutmen politik, maka ada hal yang tidak dapat dilepaskan dari fungsi itu, yakni adanya kaderisasi. Proses kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah organisasi seperti partai politik, alasan ini didasari oleh pandangan Harahap (2017: 1-2) yang mengungkapkan bahwa dari kaderisasi ini maka partai mempersiapkan atau mencetak calon-calon yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi untuk menjadi pemimpin di masa depan yang siap dalam menjalankan organisasi.

Kaderisasi dilakukan dalam rangka mendidik seseorang untuk melanjutkan tongkat estafet dari suatu partai atau organisasi (Partanto dan Al-Barry, 1994: 293-294). Dengan kata lain, proses kaderisasi diharapkan akan menghasilkan kader yang dapat memegang peranan penting dalam sebuah organisasi pada masa yang akan datang.

Di negara-negara Barat, kaderisasi untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin partai politik sudah dilakukan dengan sangat matang. Kemampuan pribadi dari kader itu sendiri memegang peranan penting selain dukungan dari partai (Parwadi, 2006: 7). Kader memiliki posisi yang strategis bagi eksistensi partai politik.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Metode ini dianggap tepat

untuk meneliti partai politik, seperti PKS, karena selain dapat menggambarkan sebuah fenomena secara lebih detail juga dapat membantu penelitian ini untuk melakukan diagnosis permasalahan yang terjadi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif yang memungkinkan untuk menggambarkan bagaimana proses kaderisasi yang dilakukan DPD PKS Kota Bandung sebagai partai yang memiliki eksistensi cukup kuat di Kota Bandung.

Penentuan studi kasus dalam metode kualitatif dianggap strategis dalam penelitian ini karena dapat menyelidiki secara cermat suatu peristiwa atau aktivitas yang terjadi di suatu tempat. Dalam studi kasus, penelitian juga dapat memilih informasi dan data yang cocok untuk mendapatkan hasil yang maksimal (Creswell, 2014: 278). Dengan studi kasus, penelitian dapat melakukan analisa proses kaderisasi yang dilakukan oleh PKS guna mendapatkan kader-kader unggulan yang diinginkan masyarakat serta dapat menjalankan tujuan dari kepentingan partai politik. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan secara purposive atau dengan sengaja sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Adapun kriteria syarat informan adalah: (1) Memiliki pengetahuan serta pemahaman tentang sejarah dan gerakan PKS; serta (2) Memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, serta tahu dan ikut andil dalam proses kaderisasi.

Dengan memilih orang dianggap paling mengetahui informasi yang sedang diteliti diharapkan dapat menggali objek atau situasi sosial yang diteliti, kemudian melakukan analisa hasil dari penelitian dengan teori penelitian.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Gerakan kaderisasi PKS yang tidak terlepas dari gerakan dakwah

PKS melakukan kerja sama dalam berbagai kekuatan guna menegakkan nilai dan sistem Islam yang *Rahmatan lil alamin* (rahmat bagi semesta) serta akselerator dengan perwujudan masyarakat madani di Indonesia. Dengan misi ini PKS mulai melebarkan dakwah Islam dan mencetak kader-kader yang kemudian dapat mengembangkan institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai *markaz taghyir* (pusat perubahan) dan pusat solusi. Pengembangan yang dilakukan PKS diantaranya gerakan dakwah kampus yang merupakan gerakan menyeru agama yang dilakukan mahasiswa di kampus. Gerakan dakwah berubah menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Lembaga Dakwah Kampus (LDK) sebagai wadah untuk seluruh aktivitas dakwah dalam rangka memperluas jejaring. (Muhtadi, 2012: 32-39).

Pola kaderisasi pada Partai Keadilan Sejahtera diuraikan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Pasal 5 Bab III. Adapun setiap anggota yang mendaftarkan diri secara sukarela, harus mampu mengikuti setiap pelatihan yang diselenggarakan, dan pembinaan kaderisasi yang dilakukan oleh partai.

Tarbiyah merupakan pembinaan berbasis kelompok kecil di bawah bimbingan seseorang murabbi yang dilakukan melalui kegiatan non formal partai. Tarbiyah memegang peranan penting pada proses kaderisasi. Organisasi-organisasi *underbrow* PKS seperti Garuda Keadilan (GK), Salimah Serikat Pekerja (SPK), Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI), Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia (KAPMI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengembangkan pola dan model kaderisasi sendiri-sendiri.

Adapun kelompok-kelompok yang secara formal bukan merupakan *under bow* PKS namun secara ideologis cukup banyak memiliki kedekatan dengan PKS adalah Rohani Islam (Rohis) dan Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Keduanya juga mengembangkan pola pembinaan dan kaderisasi yang khas. Proses kaderisasi formal partai dilakukan secara resmi oleh kepengurusan partai, yang terdiri dari tujuh jenjang yakni: TOP I (*Training* Orientasi Partai Satu), TOP II: TD I (*Training* Dasar Satu), TD II: TL I (*Training* Lanjutan Satu), TL II, dan *Training* Manajemen dan Kepemimpinan Sosial (TMKS). Proses kaderisasi formal ini juga merupakan sarana sebagai pembinaan sekaligus penjurangan kader yang akan berimplikasi pada distribusi peran dan struktural di PKS (Dhiharso, 2011).

## **2. Implementasi strategi kaderisasi oleh DPD PKS Kota Bandung**

Proses Kaderisasi DPD PKS Kota Bandung dianalisis menggunakan teori rekrutmen politik Almond dan Powell. Teori rekrutmen politik Almond dan Powell ini menekankan kepada pemilihan calon pemimpin serta pengurus partai politik dengan memberikan tiga jalur sebagai proses berjalannya rekrutmen politik. Teori rekrutmen politik Almon dan Powell berbeda dengan teori rekrutmen politik lainnya, karena teori ini merupakan teori partai politik yang berlanjut. Karena dapat diaplikasikan pada rekrutmen bakal calon legislatif sehingga tidak hanya melihat pada kegiatan partai politik yang melakukan kegiatan rekrutmen politik saja. Selain itu, setiap jalur dapat diaplikasikan terhadap seluruh rangkaian kegiatan rekrutmen partai politik. Partai politik dapat menggunakan rekrutmen politik untuk meningkatkan kegiatan kaderisasi dimulai dari proses seleksi, meningkatkan dan mempertahankan kualitas kader, sehingga

menghasilkan kader unggulan untuk meningkatkan suara partai.

Proses rekrutmen politik memiliki tujuan untuk menghasilkan kader yang berkualitas dengan menerapkan beberapa kriteria kualifikasi. Sebelum melakukan proses rekrutmen politik, partai politik tentunya melakukan proses kaderisasi terlebih dahulu agar menghasilkan kader yang berkualitas yang dapat ditempatkan sebagai pejabat publik melalui Pemilu.

Proses kaderisasi merupakan program yang berisikan suatu kegiatan pembentukan karakter dan kepribadian melalui proses pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk menghasilkan kader yang berkualitas. Melalui Pemilu, partai politik harus mengajukan calon yang dapat diterima masyarakat sehingga dapat meningkatkan jumlah suara partai.

Kader yang berkualitas memiliki peran yang sangat penting terhadap eksistensi partai politik. Masyarakat dapat mengenal partai politik melalui aktivitas partai yang dilakukan oleh kader-kadernya. Kader yang berkualitas dapat menjadi jembatan bagi masyarakat kepada untuk menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah. Dengan menjaga hubungan dan kepercayaan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan elektabilitas PKS di kota Bandung.

### **a. Kaderisasi Informal**

Kaderisasi Informal yang ada di DPD PKS Kota Bandung merupakan salah satu upaya untuk melahirkan kader unggulan dan berkualitas. Pola kaderisasi ini dilakukan dalam kurun waktu yang panjang dan cukup lama. Pendidikan dengan jangka panjang ini dilakukan oleh kader DPD PKS Kota Bandung kepada keluarganya, mulai dari anak-anak hingga menuju masa remajanya. Selain pendidikan, DPD PKS Kota Bandung juga melakukan pembentukan karakter terhadap setiap calon kader beserta keluarganya. Setiap

kader diberikan panduan “10 Karakteristik” yang menjadi andalan dalam pembentukan kepribadian serta penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan keseharian sehingga mencapai aspek-aspek yang dibutuhkan untuk mampu bersaing. Dalam kaderisasi informal terdapat nilai pokok atau poin penerapan kaderisasi yang menunjang kesuksesan kaderisasi, yaitu:

- 1) Kaderisasi Berdasarkan Panduan Panduan, seperti AD/ART maupun panduan khusus yang digunakan partai politik.
- 2) Kaderisasi Melalui Keluarga, praktek penerapan kaderisasi langsung terhadap keluarga masing-masing kader.
- 3) Kaderisasi Melalui Lingkungan Setempat, terdapat dua jalur yaitu vertikal dimana setiap kader diusahakan memiliki jabatan lain dan berorganisasi dalam lingkungan masyarakat, dimana mereka dengan posisi itu diharapkan mampu memberi kontribusi positif kepada masyarakat. Kemudian jalur horizontal, setiap kader harus mampu membuktikan dan menerapkan hasil pembelajaran yang telah diterima terhadap lingkungan partai politik.

#### b. Kaderisasi Formal

Proses kaderisasi formal merupakan upaya yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Bandung dalam membentuk pendidikan yang dilaksanakan secara terprogram dan terpadu untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh partai. Proses kaderisasi formal harus mengikuti suatu kurikulum yang telah ditentukan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. DPD PKS Kota Bandung melakukan kegiatan evaluasi berdasarkan kurun waktu yang ditentukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kader sebagai perwakilan partai di masyarakat.

Proses kaderisasi tersebut memiliki nilai positif yang mampu mendorong dan meningkatkan prestasi dengan cara meningkatkan kompetensi dan persaingan sehat. DPD PKS Kota Bandung melakukan kegiatan menghafal Alquran dengan periode seminggu sekali untuk menumbuhkan motivasi dalam rangka mengembangkan diri. Hal ini dapat meningkatkan kerja sama antar kader dengan cara berlatih bersama dalam membaca dan menghafal Alquran. Hal ini mengajarkan sebuah proses tahapan penting yaitu menebar kebaikan terhadap orang-orang di sekitar terlebih dahulu sebelum menebar kebaikan kepada masyarakat.

- 1) Proses kaderisasi formal internal merupakan proses kaderisasi yang bertujuan sebagai latihan kepemimpinan. Setiap kader diberikan tugas bergantian untuk saling memimpin sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab sebagai pemimpin dan sebagai kader yang dipimpin. DPD PKS Kota Bandung melalui bidang Sumber Daya Manusia bertanggung jawab dalam menangani proses dan penerapan kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK). Ada 2 tahapan proses dalam penerapan latihan kepemimpinan diantaranya (1) Anggota muda dipimpin oleh anggota muda, (2) Anggota muda dipimpin oleh anggota madya. Setiap anggota akan memiliki kesempatan memimpin dan dipimpin dalam setiap tahapan proses tersebut. Setiap tahapan proses latihan kepemimpinan memiliki buku laporan penilaian sebagai bahan evaluasi dan pengembangan.

Kegiatan *workshop* merupakan kegiatan lanjutan setelah kegiatan latihan kepemimpinan. Kegiatan ini merupakan agenda kegiatan yang ditetapkan oleh pusat yang bertujuan

sebagai pembentukan kader PKS. Tahapan ini merupakan langkah latihan dari setiap kader untuk menerapkan ilmu yang telah didapat selama menjalankan masa pelatihan. DPD PKS Kota Bandung telah mempersiapkan berbagai sarana bagi para kader untuk melakukan latihan tersebut. Untuk memaksimalkan hasil pendidikan dan pelatihan, DPD PKS Kota Bandung mewajibkan setiap kader melakukan kegiatan di lapangan. Hal ini bertujuan sebagai sarana bagi kader untuk menerapkan ilmu yang didapat selama pendidikan dan pelatihan dengan kondisi realita yang terjadi di masyarakat.

- 2) Proses kaderisasi formal eksternal merupakan proses tahapan seleksi sebagai calon pemimpin legislatif maupun eksekutif. Setiap calon kader diberikan kewajiban untuk berpartisipasi dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan hingga menjadi pimpinan untuk waktu tertentu. Salah satunya dengan menyebarkan kebaikan kepada masyarakat. Melalui proses ini diharapkan dapat menghasilkan calon-calon pemimpin yang berkualitas yang dapat menunjukkan latar belakang partai.

DPD PKS Kota Bandung tidak mempermasalahkan perihal calon kader dari luar partai yang tidak memiliki relasi keluarga. Salah satu prioritas utama calon kader diharapkan merupakan orang yang *Khanif* (orang baik). Sebagai contoh, kader PKS di daerah Tasikmalaya pernah membuat perubahan terhadap seseorang sehingga seseorang tersebut masuk pada bagian kader PKS. Ini merupakan penerapan atau tugas yang telah dilakukan oleh kader PKS dalam bentuk interaksi kepada individu atau masyarakat.

Gema Keadilan, salah satu *under brow* yang aktif di lingkungan masyarakat, melakukan kegiatan mendidik anak-anak, remaja, pemuda serta masyarakat pada umumnya. Mereka yang telah berinteraksi dengan PKS banyak pula yang mendirikan komunitas-komunitas di kampusnya. Seperti yang ada perguruan tinggi, jika ada mahasiswa mengikuti dan menerapkan pemikiran-pemikiran PKS, itu adalah hasil pendidikan dari keluarga yang merupakan bagian dari PKS atau mereka pernah mengikuti pembinaan sebagai kemitraan dengan PKS.

### c. Eksistensi DPD PKS Kota Bandung

DPD PKS Kota Bandung mewajibkan seluruh calon kader untuk menjadi anggota terlebih dahulu sebelum mengikuti proses tahapan kaderisasi. Dalam melaksanakan proses kaderisasi, calon kader harus lulus dalam melakukan kewajiban pada proses pendidikan hingga dapat dinyatakan lulus.

Pengaruh yang dimiliki kader terhadap eksistensi partai politik sangat penting. Kader yang akan dikenal dan diterima oleh masyarakat menjadi kunci dari eksistensi partai politik. Selain itu kegiatan partai politik yang dilakukan bersama masyarakat dan mengajak masyarakat akan membuat partai politik semakin diingat oleh masyarakat. PKS merupakan partai Islam dengan tingkat eksistensi yang sudah mencapai tahapan yang cukup dikenal dan diketahui oleh masyarakat kota Bandung. Kader yang diusung PKS adalah kader yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bandung. Kader PKS sering melakukan kegiatan bersama dengan masyarakat diantaranya mengadakan kegiatan pengajian atau *workshop* untuk masyarakat dan kegiatan langsung lainnya bersama masyarakat.

Eksistensi dari partai politik juga dipengaruhi dari hadirnya kader yang berkualitas di sekeliling masyarakat hingga

dapat membuat masyarakat memiliki calon pemimpin yang dibutuhkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat masih menilai tentang sosok atau pribadi. DPD PKS Kota Bandung harus mempersiapkan berbagai level kepemimpinan yang dapat diterima oleh masyarakat. Proses kaderisasi bukan hal yang mudah karena banyak kader yang terlihat baik dan dianggap hebat oleh internal partai belum tentu diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu DPD PKS Kota Bandung melakukan survei elektabilitas terhadap calon pemimpin. Kegiatan ini merupakan sarana mengukur kemampuan calon pemimpin dan menerima pendapat dan keinginan masyarakat tentang kriteria pemimpin yang dibutuhkan.

Kegiatan DPD PKS Kota Bandung dianggap dapat diterima di masyarakat dan mampu meningkatkan suara partai di Kota Bandung. Pendekatan juga dilakukan oleh semua level calon pemimpin yang disiapkan oleh DPD PKS Kota Bandung. Selain itu, kader PKS juga harus mempertahankan idealismenya. Kader PKS juga harus mementingkan kepentingan rakyat bukan hanya kepentingan pribadi. Pendekatan langsung kepada masyarakat oleh kader PKS akan semakin mengenalkan PKS di masyarakat.

Basis suara PKS di Kota Bandung lebih unggul dibandingkan dengan partai-partai yang berbasis Islam lainnya. Hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan suara pada pemilihan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung tahun 2014. PKS Kota Bandung pada tahun 2014 mendapatkan suara sah sebanyak 136.983 dan menjadi partai Islam dengan perolehan suara terbanyak. Diikuti oleh Partai Persatuan Pembangunan di posisi kedua dengan jumlah suara 64.993. Kemudian Partai Kebangkitan Bangsa mempati posisi ketiga dengan jumlah 42.906. Perolehan suara PKS sangat besar

dibandingkan dengan perolehan surat partai Islam lainnya. Bahkan secara keseluruhan PKS telah berhasil menggeser partai-partai yang berbasis nasionalis seperti Partai Golongan Karya (Golkar) serta Partai Demokrat. PKS Kota Bandung menjadi urutan ketiga dalam perolehan suara terbanyak setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Selisih perolehan suara tidak begitu besar. Hal ini membuktikan basis pendukung PKS di Kota Bandung cukup meyakinkan. Berdasarkan perolehan suara tersebut, PKS Kota Bandung berhasil meraih sebanyak 6 kursi di DPRD Kota Bandung pada tahun 2014 (KPU Kota Bandung, 2014).

DPD PKS Kota Bandung dikenal karena proses kaderisasi yang menarik, aksi tanggap bencana serta kegiatan yang berbasis agama yang mengikutsertakan masyarakat setempat. PKS sangat dekat dengan masyarakat melalui kader-kadernya yang berkualitas. Hal ini menggambarkan bahwa PKS sebagai partai politik sudah mencapai eksistensi yang cukup.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, narasumber sangat yakin dan percaya terhadap proses kaderisasi yang dilakukan DPD PKS Kota Bandung dapat menghasilkan kader yang berkualitas dan diterima di masyarakat. Proses kaderisasi dilaksanakan berdasarkan panduan yang telah dibuat secara nasional. DPD PKS Kota Bandung memiliki proses kaderisasi yang menarik dibandingkan dengan partai politik lainnya, terutama partai politik yang berbasis Islam. Proses kaderisasi DPD PKS Kota Bandung jika dilihat melalui teori rekrutmen politik yang dijadikan landasan penelitian ini, telah dijalankan dengan baik. Walaupun ada beberapa bagian yang penerapannya berbeda. Dengan kata lain hal ini dapat dikatakan bahwa DPD PKS

Kota Bandung melakukan improvisasi pada beberapa bagian dalam proses kaderisasi. Hal ini dilakukan dalam upaya mencapai visi, misi dan tujuan partai.

DPD PKS Kota Bandung menjalankan proses kaderisasi secara informal dan formal. Kehadiran sosok kader yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap keberadaan partai politik di masyarakat. oleh karena itu, DPD PKS Kota Bandung melakukan proses kaderisasi dengan tujuan untuk menghasilkan kader-kader unggulan yang dibutuhkan masyarakat dan partai politik. Proses kaderisasi yang dilakukan DPD PKS Kota Bandung mencapai tingkatan baik karena setiap kader menebarkan sisi positif terhadap keluarga sehingga hal-hal baik yang berkaitan dengan agama dapat menjadikan seseorang semakin dekat dengan Tuhan.

DPD PKS Kota Bandung telah menjalankan proses kaderisasi dengan menghasilkan kader-kader yang bermasyarakat serta memiliki antusiasme dalam kegiatan masyarakat. DPD PKS Kota Bandung sangat memahami bahwa dengan meningkatkan kualitas dan kemampuan kader dapat mempertahankan eksistensi partai politik. Eksistensi partai politik diukur dari perolehan suara dan kemenangan partai politik pada Pemilu maupun hasil kemenangan koalisi partai politik selama itu menguntungkan PKS. Selain itu, jumlah anggota yang terus bertambah menjadi indikator eksistensi partai politik. Hal ini dikarenakan PKS merupakan partai politik yang dianggap partai yang sejalan dengan pikiran politik yang dibangun secara pribadi oleh para kader. (Almond, 2000)

#### **Daftar Pustaka**

Almond, A. (2000). *Sosialisasi Politik Budaya Politik dan Rekrutmen Politik dalam Mochthae Masoed dan Colin Mac*

*Andrews*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

Aminuddin, M. (2017). *Reorganisasi Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia*. Sumber: <https://www.researchgate.net/publication/277967941>.

Anismar, E. (2014). *Kaderisasi pada Basis Sosial Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Jamaah Tarbiyah UI)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Budiardjo, M. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Cecep, W. (2016). *PKS Jawa Barat Gelar Sekolah Kepemimpinan Partai*. Sumber: <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/11/25/pks-jawa-barat-gelar-sekolah-kepemimpinan-partai-385846>.

Creswell, J. (2014). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dahliany, A. (2012). *Pola Rekrutmen Pemimpin Partai Politik Dalam Meningkatkan Kriteria Partai Politik (Studi Kasus di DPD PKS Kota Bandung)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Dhiharso. (2011). *Sistem Pengkaderan di Kalangan Partai Islam (Studi tentang Tarbiyah PKS Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Djuyandi, Y. (2018). *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: Rajawali Pers.

Firdaus, R. (2014). *Pengaruh Rekrutmen Partai Politik Terhadap Kepemimpinan Pemerintah di Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2010 (Studi Terhadap Bupati Drs. H. Sukamawijaya, MM yang berlatar belakang kader PKS)*. Bandung: Universitas Padjadjaran.

- Harahap, I. (2017). *Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional*. Jurnal Politik, Hlm. 1-9. Sumber: <http://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/1246>.
- Juliano, S. (2014). *Seminar Strategi Kampanye Partai Politik Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2014*. Sumber: <http://fisip.unikom.ac.id/id/page/seminar-strategi-kampanye-politik-2014.html>.
- Muhtadi, B. (2012). *Dilema PKS*. Jakarta: Gramedia.
- Partanto, P. A. & Barry, M. D. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka.
- Purwadi, R. (2006). "Kaderisasi Organisasi dalam Perubahan". Jurnal Wawasan, Vol. 12 (1), Hlm. 1-10.
- Rahadi, F. (2014). Kota Bandung Basis Suara PKS. Sumber: <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/14/03/13/n2d7ei-survei-kota-bandung-basis-suara-pks>.
- Suroto & Rudianto, D. (2003). *Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Mandala Pratama.
- Tunjungsari, A.R., Lestari, P., & Sumarno. (2017). "Gerakan Dakwah sebagai Sistem Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (Studi pada Dewan Pengurus Wilayah PKS Provinsi Jawa Tengah)". Unnes Political Science Journal, Vol. 1 (1), Hlm. 21-28.
- (2013-sekarang), pernah menjadi pendidik di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Nusantara, Jakarta (2010-2017), Staf Ahli Anggota Komisi I DPR RI (2006-2009), dan peneliti di Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) (2009-sekarang). Sejak Februari 2018 penulis juga dipercaya sebagai Kepala Pusat Studi Keamanan Nasional dan Global Universitas Padjadjaran.
2. Fifi Lutfiah Sodikin, menyelesaikan Program Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, pada tahun 2018. Saat ini bekerja sebagai peneliti di Political Insight (Polsight), Bandung, Indonesia.

---

## Tentang Penulis

1. Yusa Djuyandi, menyelesaikan Program Doktor Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, dengan predikat Cumlaude. Sebelum menjadi pendidik di Program Studi Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran